

Tutuk Tersangka Bansos

SEMARANG - Tutuk Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah dari Pemprov Jawa Tengah kepada Yayasan Sam Poo Kong.

Penetapan itu terkait posisi dia sebagai Ketua Yayasan Sam Poo Kong yang berperan sebagai kuasa penerima hibah. Dana hibah Rp 14,5 miliar untuk pembangunan Klenteng Sam Poo Kong di Jalan Simongan Raya 129 Semarang itu diduga bocor.

"Tersangka (Tutuk- Red) selaku kuasa penerima dana hibah diduga tidak menggunakan dana sebagaimana yang tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Babul Khoir Harahap, Kamis (14/11).

Berdasar temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada dana Rp 3,5 miliar yang mengalir dari rekening penerimaan dana hibah itu ke rekening pribadi Tutuk dan

perusahaannya. "Kami sudah memblokir rekening pribadi dan perusahaan milik tersangka," kata Babul.

Pihaknya juga melayangkan permohonan cekal ke Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung untuk diteruskan ke Direktorat Jenderal Imigrasi.

Tidak Menduga

Tutuk Kurniawan yang juga Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Tengah itu, tak menduga dirinya bakal menjadi tersangka kasus tersebut. Dia menyatakan baru dimintai keterangan oleh Kejaksaan Tinggi sebanyak dua kali.

Menurutnya, dia tak pernah melakukan penyelewengan dana hibah Yayasan Sam Poo Kong. Namun, Tutuk mengakui adanya dana hibah ke rekening pribadinya.

"Itu bukan penyelewengan, hanya kesalahan administrasi. Dari BPK sendiri tidak ada temuan kerugian negara. Semua dibangun sesuai ketentuan. Itu

(Sam Poo Kong) kan kami bangun, kalau tidak ada dana kami tomboki dulu. Kalau sudah ada dana, baru ditransfer ke rekening," kata Tutuk di Kantor New Atlas Taksi, Jalan Telaga Bodas 1.

Menurut dia, aliran dana ke rekening pribadinya itu merupakan pengganti dana talangan yang telah dikeluarkannya. Ia mengklaim dana hibah yang telah diterima Yayasan Sam Poo Kong sudah dipertanggungjawabkan secara baik.

Hibah yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke Sam Poo Kong itu ada dua tahap.

Pada 2011 sebanyak Rp 4,5 miliar dan 2012 sebanyak Rp 10 miliar. Pada Mei 2013, BPK menemukan tiga item pekerjaan yang belum diselesaikan.

Harusnya tiga pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan dana Rp 8,75 miliar, namun kenyataannya baru senilai Rp 1,6 miliar. (H89, K24-71)